

PENGARUH PAD DAN DAU TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Lisandri⁽¹⁾
Fahmi Rizani⁽²⁾
Akhmad Yafiz Syam⁽³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin^{(1) (3)}
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin⁽²⁾

Artikel info

Keywords:
PAD, DAU, *Capital Expenditure*, *Economic Growth*

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze how PAD and DAU variables are affecting economic growth both directly and indirectly. This paper is important because it differs from previous studies, which generally place economic growth as an exogenous factor, and the results still show inconsistency. While this research puts the variable of economic growth in endogenous position, that is as a factor influenced by public expenditure, which in this context allocation of capital expenditure. The focus of this paper is to describe and answer the question of how the impact of PAD and DAU on Economic Growth through the allocation of Capital Expenditures. PAD is an indicator of local government productivity that is influenced by local government innovation in developing productive assets. However, the results of this study indicate that PAD has no significant effect on capital expenditure allocation. PAD is also an indicator of regional independence in providing financing sources of regional development. Theoretically, the greater the PAD of an area, the more independent the region. But for whatever achievement PAD, if there is inefficiency in the management, the amount of PAD will be absorbed for operational financing, so it does not affect the capital expenditure for investment purposes. DAU has a significant influence on capital expenditure and economic growth. The total effect of DAU on Economic Growth through Capital Expenditure is 0.359 or 36 percent. Indirect influence (0.082 or 82 percent) DAU is greater than direct impact on economic growth (28 percent). This proves that capital expenditure variables are significant as intervening variables in the context of this study.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan wujud kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan aset daerah yang akan dioptimalkan untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan daerah dalam menyejahterakan rakyatnya adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan capaian peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Otonomi juga merupakan tuntutan perubahan paradigma *New Public Management* (NPM) menuju tata kelola (*good governance*) pemerintahan yang baik, karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja dan mengurangi inefisiensi belanja pemerintah (Wardhani, Rossieta, & Martani, 2017).

Sesuai arahan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan yang memungkinkan kemandirian daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah merupakan jalan terbaik untuk mendorong pembangunan daerah karena kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Halim, 2012).

Dalam ilmu ekonomi *Keynesian*, pengeluaran pemerintah yang meningkat akan meningkatkan produksi (Jahan, Mahmud, & Papageorgiou, 2014) sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam literatur ekonomi, (Azwar, 2016; Barro, 1991; Gillis, Perkins, Roemer, & Snodgrass, 1992) dikenal ada dua pandangan yang berlawanan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah. *Wagner's Law* menyatakan bahwa seiring pertumbuhan ekonomi, maka begitu pula ukuran belanja sektor publik. Diantaranya hasil penelitian

Barro (1991) memberikan bukti empiris tentang ini.

Dalam pandangan *Wagner's Law* atau dikenal *the 'law of expanding state expenditure'* tersebut bahwa jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka pemerintah akan meningkatkan belanja modal untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (Salih, 2012).

Ramayandi (2003) mengemukakan bahwa minat penelitian pada hubungan konseptual antara pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah telah dimulai sejak awal abad ke-19. Penghasilan agregat pada awalnya dianggap sebagai penentu penting ukuran pemerintah, dan hubungan tersebut telah dikenal secara luas dalam literatur sebagai '*hukum Wagner*' atau 'hukum untuk memperluas pengeluaran negara', seperti pertumbuhan ekonomi, sektor publik cenderung berkembang. Namun, argumen yang lebih baru cenderung lebih memperhatikan hubungan balik kedua variabel tersebut.

Penelitian yang menghubungkan belanja publik atau belanja modal terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel endogen, terutama di Indonesia sepengetahuan penulis masih sangat terbatas. Umumnya penelitian seperti ini dilakukan untuk negara-negara Asia lainnya, yang pertumbuhan ekonominya meningkat pasca krisis ekonomi. Di antara penelitian yang cukup berpengaruh, dilakukan oleh Barro (1991), (Baffes & Shah, 1998), (Azeem Qureshi, 2009), (Sahoo, Dash, & Nataraj, 2010), (Ali, Rabbi, Hayat, & Ali, 2013), sedangkan di Indonesia oleh Ramayandi (2003), dan Wardhani et al. (2017).

Wardhani et al. (2017) meneliti pengaruh belanja publik terhadap kinerja pemerintah, menyimpulkan bahwa belanja pe-

merintah yang lebih tinggi harus menghasilkan hasil yang lebih baik. Jika pemerintah daerah membelanjakan uangnya namun belum bisa memberikan kualitas layanan yang tinggi, maka belanja pemerintah daerah tidak efisien. Berdasarkan argumen ini, didefinisikan bahwa efisiensi dalam pengeluaran pemerintah sebagai efek positif dari pengeluaran untuk hasil ekonomi. Jika pemerintah tidak bisa mengelola pengeluarannya secara efisien, maka kenaikan belanja pemerintah tidak mengarah pada kenaikan hasil ekonomi (pertumbuhan ekonomi).

Sahoo et al. (2010) menyelidiki peran infrastruktur dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi di China untuk periode 1975 sampai 2007. Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, angkatan kerja, investasi publik dan swasta telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di China. Lebih penting lagi, bahwa pembangunan Infrastruktur di China memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan investasi swasta dan publik. Selanjutnya, ada hubungan kausal searah dari pembangunan infrastruktur hingga pertumbuhan *output* yang membenarkan pengeluaran tinggi China untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk utama pengeluaran belanja publik yang merupakan bagian dari belanja modal.

Penelitian terhadap faktor-faktor determinan belanja modal, termasuk pertumbuhan ekonomi (sebagai variabel eksogen) terhadap alokasi belanja modal, dalam skala regional, cukup banyak di Indonesia. Merina and Sari (2016) misalnya, menyimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Berbeda dengan Hidayati (2016), yang menyimpulkan bahwa PAD dan

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Fajrina (2014), menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap Belanja Modal, namun secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Ini mengindikasikan dugaan kuat, bahwa belanja modal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Tamawiwiy, Sondakh, and Warongan (2016), menyimpulkan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya menguji hubungan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel eksogen, dan hasilnya pun masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Sedangkan penelitian ini menempatkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel endogen, yaitu sebagai faktor yang dipengaruhi oleh belanja publik, yang dalam konteks ini alokasi belanja modal.

Shapiro (2005) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Konflik hubungan keagenan sering terjadi antara *agent* dan *principal*. *Agent* dan *principal* memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda. *Principal* menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang ditanamkan sedangkan *Agent* menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan organisasi.

Menurut Watts and Zimmerman (1990) *agency problem* juga terdapat dalam organisasi publik. Rakyat selaku prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah bisa melakukan kebijakan yang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Teori kontijensi yang deskriptif membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya, sementara teori kontijensi yang preskriptif membahas perilaku yang paling efektif dalam setiap jenis situasi (Robbins & Judge, 2013). Teori kontijensi mengklaim bahwa tidak ada cara terbaik dalam mengelola suatu organisasi, mengendalikan, ataupun membuat keputusan. Semua tindakan optimal tergantung pada situasi internal maupun eksternal (Husted, 2000). Ini berpengaruh terhadap pertimbangan bagaimana belanja modal dialokasikan.

Hatch and Cunliffe (2012) mengemukakan teori kontijensi berdasarkan pada pemikiran bahwa secara universal, tidak terdapat sistem yang tepat yang penerapannya dapat dilakukan pada setiap organisasi.

Para peneliti dibidang akuntansi menggunakan teori kontinjensi saat menelaah hubungan antara faktor organisatoris dan pembentukan sistem pengendalian manajemen (Otley, 1999).

Menurut Glenn A Welsch (1995) anggaran adalah *statement* dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai *blue print* dalam periode itu. Anggaran memiliki fungsi sebagai: (1) instrumen politik, (2) Instrumen Kebijakan Fiskal (3) Instrumen Perencanaan (4) Instrumen Pengendalian.

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Parameter tersebut menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dasar oleh pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi (Ramayandi, 2003).

Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa (Sahoo et al., 2010). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan *output* per kapita. PDRB adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis bagaimana variabel PAD dan DAU memengaruhi pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung. Makalah ini menjadi penting karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan menghubungkan pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Fokus makalah ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjawab masalah bagaimanakah pengaruh PAD dan

DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui pengalokasian Belanja Modal. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat dalam mempertimbangkan kebijakan terkait variabel PAD dan DAU yang perannya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung.

Hubungan PAD terhadap pengalokasian Belanja Modal

Secara teoritis peningkatan PAD akan meningkatkan belanja modal, yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya meningkatkan jumlah produksi masyarakat. Tetapi secara empiris bisa saja harapan ini tidak berjalan, karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya sebagaimana temuan Adiputra and Dwiyantari (2015).

Sugiardi and Supadmi (2014), dan Merina and Sari (2016), mengkonfirmasi bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan menurut Hidayati (2016) PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga perlu melakukan pengujian kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H1: PAD berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja modal

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk perimbangan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi

transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan layanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Pradita and Prastiwi (2012) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Hal ini didukung oleh Suhardjanto, Sulistyorini, and Hartoko (2009). Namun hal ini berbeda dengan Sugiardi and Supadmi (2014) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

PAD, DAU, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa (Sahoo et al., 2010). Penelitian-penelitian Merina and Sari (2016), Hidayati (2016), Maryam Nur Fajrina (2014), Tamawiy et al. (2016), Sularno (2013), Ardhini (2011), Maharani and Adi (2013) umumnya menguji pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal atau menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel eksogen, dan hasilnya pun masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Sedangkan penelitian ini menempatkan variabel pertumbuhan ekonomi (Azwar, 2016; Barro, 1991; Gillis et al., 1992) pada posisi endogen, yaitu sebagai variabel yang dipengaruhi oleh belanja publik,

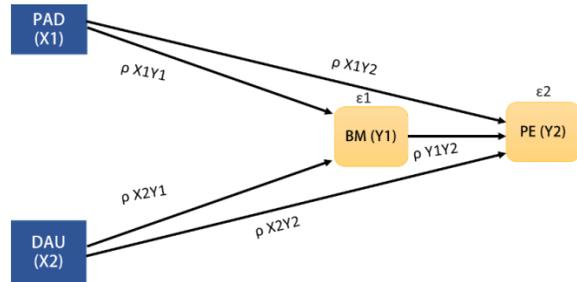
dalam konteks ini alokasi belanja modal, sebagaimana dilakukan di antaranya oleh Sahoo et al. (2010). Berdasarkan ini, maka dikemukakan hipotesis penelitian berikut:

- H3: PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi
- H4: DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi
- H5 : pengalokasian belanja modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Jenis data yang diobservasi adalah data sekunder. Data diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, berupa dokumen APBD tahun 2012 hingga tahun 2016, yang dipublikasikan dalam Buku Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, dan data pendukung melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpkpd.go.id). Data APBD yang dianalisis adalah *time series* selama lima tahun untuk 13 kabupaten dan kota yang menggambarkan secara *cross sectional* seluruh variabel yang diobservasi. Penggabungan data ini dikenal sebagai data panel, sehingga jumlah data yang dianalisis adalah untuk 13 ka-

bupaten dan kota dikali dengan 5 tahun, yaitu sebanyak 65 unit amatan. Hubungan antar variabel dan uji hipotesisnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Analisis

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Path Analysis* dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* V.22. Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, perumusan model *Path Analysis*, dan uji hipotesis. Persamaan jalur untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y1 = \rho X1 Y1 + \rho X2Y1 + \epsilon 1 \dots \text{(Model Sub Struktural 1)}$$

$$Y2 = \rho X1Y2 + \rho X2Y2 + \rho X3Y2 + \rho X4Y2 + \rho Y1Y2 + \epsilon 2 \dots \text{(Model Sub Struktural 2)}$$

Keterangan:

- X1= PAD = Pendapatan Asli Daerah
- X2= DAU = Dana Alokasi Umum

Tabel 1. Variabel dan Pengukuran

| Variabel | Indikator | Skala Ukur | Keterangan |
|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Jumlah PAD | Rasio | Variabel Eksogen |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | Jumlah DAU | Rasio | Variabel Eksogen |
| Belanja Modal (BM) | Jumlah Belanja Modal | Rasio | Variabel Intervening |
| Pertumbuhan Ekonomi (PE) | PDRB Harga Berlaku | Rasio | Variabel Endogen |

Y1= BM = Belanja Modal
 Y2= PE = Pertumbuhan Ekonomi
 ρ = Koefisien Path
 ε = Tingkat Kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum model digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam analisis jalur, ada empat asumsi harus dipenuhi, yaitu asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua asumsi terpenuhi. Tabel 2 dan Tabel 3 masing-masing menyajikan simpulan hasil uji (lihat lampiran) statistik model pertama dan kedua yang terkait dengan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Model Sub Struktural 1

| Model | Coef (Path) | t | Sig. |
|-------------------|-------------|-------|------|
| 1 PAD (X1) | ,125 | 1,079 | ,285 |
| DAU (X2) | ,357 | 2,933 | ,005 |
| R2 = ,742 | | | |
| F Hitung = 23,479 | | | |
| Sig. F = ,000 | | | |

Sumber: Olahan SPSS 22

Analisis Model Sub Struktural 1

Hasil pengujian model pertama menunjukkan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan signifikansi dibawah 0,05 (p=0,000), dan koefisien nilai R2 sebesar 0,742 atau dibulatkan menjadi 74 persen, yang berarti bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel-variabel yang diobservasi sebesar 74 persen. Sisanya, 26 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Berda-

sarkan nilai koefisien jalurnya, $\rho Y_1 X_1 = 0,125$ atau 13 persen; dan $\rho Y_1 X_2 = 0,357$, atau 36 persen serta signifikan dengan $sig < 0,285$ pada jalur X1, $sig > 0,005$ pada jalur X2. Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan PAD dan DAU dapat dijadikan variabel yang berpengaruh terhadap Belanja Modal, tetapi secara parsial hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap Modal Kerja. Selanjutnya, pengaruh kausal empiris antara variabel (X1) dan (X2) tersebut dapat digambarkan melalui persamaan sub struktural 1 (satu):

$$Y1 = 0,125 X_1 + 0,357X_2 + 0,508\epsilon_1$$

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Model Sub Struktural 2

| Model | Coef (Path) | t | Sig. |
|------------------|-------------|-------|------|
| 1 PAD (X1) | ,025 | 3,079 | ,495 |
| DAU (X2) | ,277 | 4,333 | ,002 |
| Belanja Modal | ,231 | 2,467 | ,003 |
| R2 = .502 | | | |
| F Hitung = 8.057 | | | |
| Sig. F = ,000 | | | |

Sumber: Olahan SPSS 22

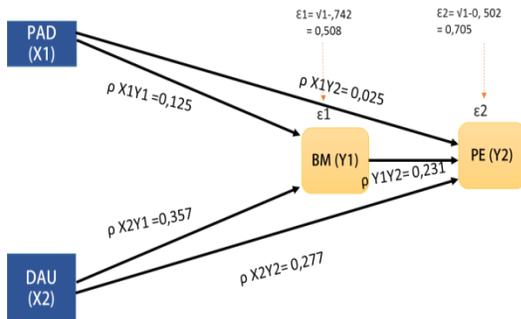
Analisis Model Sub Struktural 2

Hasil pengujian model ke dua menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan Belanja Modal dengan signifikansi (p=0,000) < 0,05, dan koefisien nilai R2 sebesar 0,502 atau dibulatkan menjadi 50 persen, yang berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh variabel-variabel yang diobservasi dengan pengaruh sebesar 50 persen. Sisanya, 50 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sedangkan secara parsial, berdasarkan nilai koefisien jalurnya, dapat dijelaskan pada persamaan struktural dua dibawah. Berdasarkan signifikansi 0,05, maka variabel PAD (p =

0,495) > 0,00 dinyatakan tidak signifikan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel DAU ($p=0,002$) < 0,000; berarti dinyatakan signifikan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta Belanja Modal ($p=0,003$) < 0,000; berarti dinyatakan signifikan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian secara parsial PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; sedangkan DAU dan Belanja Modal memiliki berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengaruh kausal empiris antara variabel tersebut dapat digambarkan melalui persamaan sub struktural dua berikut:

$$Y_2 = \rho_{Y_2 0,025} + \rho_{Y_2 0,277} + \rho_{Y_2 0,231} + \epsilon_0,705$$

Berdasarkan hasil analisis dan persamaan di atas, maka dapat diperoleh diagram model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Model Hasil Analisis Jalur

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan uji signifikansi jalur X1, dengan signifikansi PAD ($p=0,495$) > 0,00 PAD dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Koefisien jalur X1 ini bertanda positif yang artinya, kenaikan PAD mampu memengaruhi kenaikan Belanja Modal, sebesar 13 persen tetapi tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis H1: PAD berpe-

ngaruh terhadap pengalokasian belanja modal ditolak. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi hasil penelitian Sugiardi and Supadmi (2014), Merina and Sari (2016), tetapi konsisten dengan penelitian Hidayati (2016) bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Besarnya PAD suatu daerah dapat memiliki arti bahwa besarnya kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah, namun apabila terjadi inefisiensi dalam pengelolaannya, besaran PAD tersebut akan banyak terserap untuk pembiayaan operasional, sehingga tidak memengaruhi belanja modal daerah untuk kepentingan investasi. Dalam konteks ini, daerah belum memiliki kemandirian dalam menghasilkan *outcome* pembangunan, dalam arti sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

2. Pengaruh DAU terhadap pengalokasian Belanja modal

DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan signifikansi $P= 0,005 < 0,05$. Besaran pengaruh DAU terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,357 atau dibulatkan menjadi 36 persen, yang berarti DAU mampu memengaruhi Belanja Modal sebesar 36 persen.

Maka dapat disimpulkan bahwa H2: Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Yunus, Bustaman, & Rashdi, 2014), Suhardjanto et al. (2009), Sugiardi dan Supadmi (2014) yang menyatakan variabel DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. DAU cenderung digunakan untuk kegiatan pemerintahan daerah selain pembangunan infrastruktur, dengan kata lain lebih banyak untuk belanja rutin (DJPK, 2013).

3. PAD berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan uji signifikansi, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan signifikansi $P = 0,495 > 0,05$. Besaran pengaruh langsung PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien jalur $\rho_{X1Y2} = 0,025$ atau dibulatkan menjadi 3 persen. Berdasarkan analisis ini, maka hipotesis H3: PAD berpengaruh langsung signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat diterima.

4. DAU berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan uji signifikansi, DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan signifikansi $P = 0,002 < 0,05$. Besaran pengaruh langsung DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien jalur $\rho_{X2Y2} = 0,277$ atau dibulatkan menjadi 28 persen. Berdasarkan analisis ini, maka hipotesis H4: DAU berpengaruh langsung signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat diterima.

5. PAD berpengaruh tidak langsung terhadap *Pertumbuhan Ekonomi*

Pengaruh langsung PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0,025. Sedangkan pengaruh tidak langsung PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yaitu melalui Belanja Modal = $0,125 * 0,231 = 0,029$. Secara total koefisien jalur antara PAD (X1) ke Pertumbuhan Ekonomi (Y2) adalah $0,025 + 0,029 = 0,054$. Dengan demikian diketahui pengaruh secara total PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal hanya sebesar 0,054 atau 6 persen. Dari analisis jalur ini ditemukan bahwa pengaruh tidak langsung (0,029 atau 3 persen) lebih besar daripada pengaruh langsung (0,025 atau 2 persen). Jadi, hipotesis H5: PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal, dapat diterima.

6. DAU berpengaruh tidak langsung terhadap *Pertumbuhan Ekonomi*

Pengaruh langsung DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0,277. Sedangkan pengaruh tidak langsung DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yaitu melalui Belanja Modal = $0,357 * 0,231 = 0,082$. Jadi total koefisien jalur antara DAU (X2) ke Pertumbuhan Ekonomi (Y2) adalah $0,277 + 0,082 = 0,359$. Dengan demikian diketahui pengaruh total DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal adalah sebesar 0,359 atau 36 persen. Sedangkan pengaruh langsung DAU terhadap pertumbuhan ekonomi (0,277 atau 28 persen) lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung (0,082 atau 82 persen). Jadi, hipotesis H6: DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal, diterima.

PENUTUP

Simpulan

PAD merupakan salah satu indikator produktivitas pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh inovasi pemerintah daerah dalam mengembangkan aset produktif. Peningkatan inovasi pengembangan aset produktif pemerintah daerah menyebabkan peningkatan dana yang dialokasikan untuk belanja modal (Ramayandi, 2003). Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. PAD juga merupakan indikator kemandirian daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar PAD suatu daerah, berarti semakin mandiri daerah itu. Namun sebesar apapun capaian PAD, apabila terjadi inefisiensi dalam pengelolaannya, besaran PAD tersebut akan banyak terserap untuk pembiayaan operasional, sehingga tidak memengaruhi belanja modal daerah untuk kepentingan investasi. Dalam konteks ini, daerah belum memiliki kemandirian dalam

menghasilkan *outcome* pembangunan, dalam arti sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, yaitu DAU.

Secara parsial DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi. Pengaruh total DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal adalah sebesar 0.36 atau 36 persen. Pengaruh tidak langsung (0,82 atau 82 persen) DAU lebih besar daripada pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (28 persen). Ini membuktikan bahwa variabel belanja modal signifikan sebagai variabel intervening dalam konteks penelitian ini.

DAU yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur menentukan pola dan jumlah alokasi belanja modal dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur adalah pembangunan yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik di berbagai sektor, yang memfasilitasi peningkatan produksi. Oleh karena itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan sektor publik di Indonesia adalah inefisiensi belanja pemerintah dan rendahnya kualitas pemerintahan yang gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik (Wardani, 2012). Inefisiensi dapat menyebabkan PAD lebih banyak disalurkan kepada pembiayaan operasional, bukan belanja modal. Akibatnya, PAD tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Untuk menekan inefisiensi dalam belanja publik, salah satunya adalah perlunya peningkatan kualitas tata kelola yang lebih baik

(*Good governance*) di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat, melalui investasi daerah maupun swasta, didukung oleh tata kelola yang efisien, efektif, dan bebas dari pola belanja koruptif.

Pengalaman dari China membuktikan bahwa belanja modal menjadi salah satu strategi intervensi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing, melalui investasi sarana prasarana infrastruktur (Sahoo et al., 2010).

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian di antaranya: (1) lingkup penelitian adalah regional Kalimantan Selatan, sehingga dibatasi oleh karakteristik daerah, baik luasan wilayah maupun budaya dan khas lainnya yang kemungkinan berpengaruh terhadap hasil penelitian; (2) interpretasi hasil penelitian ini tidak didukung oleh pendalaman secara personal terhadap para pemangku kepentingan di daerah observasi; karena hanya menggunakan data sekunder.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk melakukan penelitian serupa dengan lingkup yang lebih luas (nasional) dan mempertimbangkan perbedaan karakteristik daerah, serta dengan variabel-variabel lainnya yang belum diamati.

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, I. M. P., & Dwiyantari, N. K. D. D., Dewa Kadek, 2015. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel*

- Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali). Seminar Nasional Akuntansi 18 Medan.*
- Ali, S., Rabbi, F., Hayat, U., & Ali, N., 2013. The composition of public expenditures and economic growth: evidence from Pakistan. *International Journal of Social Economics*, 40(11), 1010-1022. doi:doi:10.1108/IJSE-05-2012-0081
- Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Azeem Qureshi, M. 2009. Human development, public expenditure and economic growth: a system dynamics approach. *International Journal of Social Economics*, 36(1/2), 93-104.
- Azwar, A. 2016. Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 149-167.
- Baffes, J., & Shah, A. 1998. Productivity of Public Spending, Sectoral Allocation Choices, and Economic Growth. *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 46, No. 2 (January 1998), pp. 291-303. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.1086/452339>
- Barro, R. J. 1991. Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly journal of economics*, 106(2), 407-443.
- Gillis, M., Perkins, D. H., Roemer, M., & Snodgrass, D. R. 1992. *Economics of development*: WW Norton & Company, Inc.
- Glenn A Welsch, R. W. H., dan Paul N. Gordon, 1995. *Budgeting (Penyusunan Anggaran Perusahaan) Perencanaan dan Pengendalian Laba*.
- Halim, A., 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L., 2012. *Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives*: Oxford university press.
- Hidayati, N., 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Husted, B. W., 2000. A contingency theory of corporate social performance. *Business & Society*, 39(1), 24-48.
- Jahan, S., Mahmud, A. S., & Papageorgiou, C., 2014. What Is Keynesian Economics? *FINANCE & DEVELOPMENT*, September 2014, Vol. 51, No. 3. Retrieved from <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm>
- Maharani, A., & Adi, W. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jupe-Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(3).
- Maryam Nur Fajrina, L. S., SE.,M.Si. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Program Studi S1 Akuntansi, FEB Universitas Telkom.
- Merina, C. I., & Sari, M., 2016. Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Medan: *Seminar Nasional Akuntansi*.
- Otley, D. 1999. *Performance Management: a Framework for Management Control*

- Systems Research. *Management accounting research*, 10(4), 363-382.
- Pradita, R. R., & Prastiwi, D. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Ramayandi, A., 2003. *Economic growth and government size in Indonesia: some lessons for the local authorities*. Paper presented at the The 5th IRSA International Conference, Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Poverty, and Environment, Bandung.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A., 2013. *Organizational Behavior* (15 ed.). New York: Pearson Education, Inc.
- Sahoo, P., Dash, R. K., & Nataraj, G. 2010. Infrastructure development and economic growth in China. *Institute of Developing Economies Discussion Paper*, 261.
- Salih, M. A. R., 2012. The relationship between economic growth & Government expenditure: Evidence from Sudan: *International Business Research*, 5(8), 40.
- Shapiro, S. P. 2005. Agency theory. *Annu. Rev. Sociol.*, 31, 263-284.
- Sugiarthi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(2).
- Suhardjanto, D., Sulistyorini, E. J., & Hartoko, S. 2009. The Influence of Fiscal Decentralization on The Public Expenditure In Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 13(3).
- Sularno, F. M. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*.
- Tamawiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing" Goodwill"*, 7(2).
- Wardani, D. S. K., 2012. Pengaruh Pelatihan Komunikasi Efektif untuk Meningkatkan Efikasi Diri Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 1(2).
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. 2017. Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77-102.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. 1990. Positive accounting theory: a ten year perspective. *Accounting review*, 131-156.
- Yunus, O. M., Bustaman, H. A., & Rashdi, W. F. A. W. M. 2014. Conducive business environment: Local government innovative work behavior. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 129, 214-220.
- Whittaker, James B. 1995. *The Government Performance and Result Act of 1993: A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement*, Educational Services Institut: Arlington, Virginia.